

Nomor LHP dan Tgl. LHP

700 / IV.B / 01 / 275 / K / 2025

Desa Jumpang Kec Bancak

Temuan

24/01/2025

Penyebab

Rekomendasi

Tindaklanjut

1 Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang belum membuat secara tertulis untuk tugas dan fungsi pengelola dana desa.(2.01.01)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1 Menetapkan tugas dan fungsi pengelola dana desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. (09)

dokumen yg dibutuhkan kades agar Menetapkan tugas dan fungsi pengelola dana desa dengan Surat Keputusan

<0000>

<0104>

<0000>

2 Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang belum ada pemisahan tugas dari pengelola dana desa dan Siskeudes, tugas penginputan kedalam Siskeudes masih dikerjakan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.(2.03.05)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1 Kepala Desa agar Menetapkan Surat Keputusan petugas pengelola penginput Siskeudes. (09)

kades agar Menetapkan Surat Keputusan petugas pengelola penginput Siskeudes

<0000>

<0104>

<0000>

3 Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang belum membuat Surat Keputusan Pemegang Barang/ Aset desa.(2.02.07)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1 Kepala Desa agar Menetapkan Surat Keputusan Pemegang Barang/ Aset Desa. (09)

kades agar Menetapkan Surat Keputusan Pemegang Barang/ Aset Desa

<0000>

<0104>

<0000>

4 Publikasi APB Desa Tahun 2024 berupa MMT di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat, belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku karena belum memuat pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.(2.01.04)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1 Kepala Desa agar Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar mempublikasikan APB Desa Tahun 2024 berupa MMT di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (09)

kades agar mempublikasikan APB Desa Tahun 2024 berupa MMT di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

<0000>

<0104>

<0000>

5 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya karena TPK belum membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kaur/ Kasi.(2.01.01)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk :
a. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan dan dilaporkan kepada Kaur/ Kasi (09)

TPK agar Membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan dan dilaporkan kepada Kaur/ Kasi.

<0000>

<0104>

<0000>

<p>o Kaur/Kasi pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dalam Mengajukan SPP telah terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, RAB dan Lampiran Bukti Transaksi, namun belum melampirkan Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.(2.01.01)</p>	<p>1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.</p>	<p>1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Kaur/ Kasi untuk :</p> <p>a.Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat dan melampirkan Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mengajukan SPP.(09)</p>	<p>kaur kasi agar Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat dan melampirkan Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mengajukan SPP</p>
<p>7 Kaur/ Kasi Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang telah menyusun DPA yang terdiri dari : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Anggaran Biaya, namun untuk Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) belum disusun.(2.01.01)</p>	<p>1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.</p>	<p>1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Kaur/ Kasi untuk :</p> <p>Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar Membuat/ menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD). (09)</p>	<p>kaur kasi agar Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar Membuat/ menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD)</p>
<p>8 Kaur dan Kasi Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan kegiatan anggaran belum menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. (2.01.01)</p>	<p>1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.</p>	<p>1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Kaur/ Kasi untuk :</p> <p>Membuat buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. (09)</p>	<p>kaur kasi agar Membuat buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya</p> <p>- bukti dukung (sampel).</p>
<p>9 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang pelaksanaan kegiatan anggaran belum menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. (2.01.01)</p>	<p>1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.</p>	<p>1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Kaur/ Kasi untuk :</p> <p>Menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. (09)</p>	<p>kaur kasi agar Menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai</p>

10 Kaur/Kasi Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dalam menyusun rencana pelaksanaan swakelola pengadaan barang/ jasa yang berupa rencana penggunaan tenaga, bahan, peralatan, gambar kerja, namun untuk jadwal/ waktu pelaksanaan belum dibuat. (2.01.01)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Kaur/ Kasi untuk :
Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat jadwal/waktu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. (06)

Kaur kasi agar Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat jadwal/waktu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

11 TPK Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang telah menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai 100% dengan Berita Acara Serah Terima, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku Karena TPK membuat Berita Acara Serah terima hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa yang seharusnya TPK membuat Berita Acara Serah terima hasil pengadaan barang/ jasa kepada Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa. (2.01.01)

1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk :
Membuat Berita Acara Serah Terima hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kaur/ Kasi Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa. (06)

TPK agar Membuat Berita Acara Serah Terima hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kaur/ Kasi Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.

12 Kaur Keuangan Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku Bendahara Desa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya namun belum : (2.01.01)
a. Menutup Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan sekali;
b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas.

1 Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi maupun Bendahara Desa belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa.

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk :
Kaur Keuangan Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku Bendahara Desa untuk membuat dan menutup BKU setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. (09)

TPK agar membuat dan menutup BKU setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

13 Petugas/ Pengurus Aset Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya. (2.01.01)

1 Hal ini disebabkan Pengurus Barang Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang kurang memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku Pengguna Barang.

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar :
Memerintahkan secara tertulis kepada Pengurus Aset Desa untuk :
1. Memberi kodefikasi barang inventaris desa yang belum ada kodefikasinya. (06)
2. Membaharui Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan kemudian dipasang disetiap ruangan. (06)

surat perintah kades kpd pengurus aset disertai surat tanggapan agar:

1. Memberi kodefikasi barang inventaris desa yang belum ada kodefikasinya.
2. Membaharui Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan kemudian dipasang disetiap ruangan.

- dokumentasi kodifikasi barang

<0000>

14 Petugas/ pengurus aset desa belum menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset desa kepada pembantu pengelola aset desa (laporan tahunan). (2.01.01)

<0104>

1 Hal ini disebabkan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa kurang memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

<0000>

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar :
Melaporkan laporan Aset Desa Tahunan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. (09)

kades agar Melaporkan laporan Aset Desa Tahunan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. (-)

<0000>

15 Pembantu Pengelola Aset Desa belum melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset desa tahunan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa. (2.01.01)

<0104>

1 Hal ini disebabkan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa kurang memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

<0000>

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar :
Memerintahkan secara tertulis kepada :
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa, untuk melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. (09)

surat perintah kades kpd sekdes disertai surat tanggapan agar melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa ✓

<0000>

<0104>

<0000>

10 Laporan Aset Desa tahunan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat belum dikerjakan. (2.01.01)

1 Hal ini disebabkan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa kurang memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1 Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar :
Memerintahkan secara tertulis kepada :
Kepala Urusan selaku Petugas/ pengurus Aset Desa untuk menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset desa kepada Pembantu Pengelola Aset Desa (laporan tahunan), laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. (09)

surat perintah kades kpd pengurus aset disertai surat tanggapan agar menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset desa kepada Pembantu Pengelola Aset Desa (laporan tahunan), laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya ✓

<0000>

<0104>

<0000>